BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

BBC Indonesia menghadirkan dua artikel berita yang dimuat pada laman situs resminya yang berjudul “Kesaksian Keluarga Demonstran Tolak RUU Pilkada yang Jadi Korban Kekerasan Aparat – ‘Anak Saya Melawan Ketidakadilan, kenapa Diperlakukan Seperti Binatang?’” yang terbit pada 23 Agustus 2024 dan artikel berjudul “Repetisi ‘Brutalitas Polisi’ dalam Demonstrasi Revisi UU Pilkada, Mengapa Terus Berulang?” yang dipublikasikan pada 08 September 2024. Dalam kedua artikel tersebut pembahasannya berfokus pada tindakan yang dilakukan oleh aparat beserta dampaknya terhadap para demonstran yang menyuarakan aspirasinya menolak RUU Pilkada 2024. Dari kedua berita tersebut ditemukan sentimen negatif terhadap aparat kepolisian pada demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat.

Dari penelitian yang dilakukan menggunakan analisis wacana kritis model Norman Fairclough, ditemukan wacana yang dibangun BBC Indonesia terhadap Polisi Indonesia yang dilihat dari tiga dimensi. Dimensi pertama yaitu dimensi teks, yang menemukan teks berita yang dibuat oleh BBC Indonesia bersentimen negatif dan banyak menggambarkan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Penggambaran kekerasan ini menjadikan citra Polri tergambar dengan buruk pada liputannya. Polisi dicitrakan sebagai aparat yang agresif, arogan, dan tidak

pandang bulu dalam melakukan tindakan yang bersifat represif. Hal ini disebabkan oleh ideologi yang membelakangi produksi teks tersebut.

Ideologi yang melatarbelakangi BBC dalam menghasilkan produk teksnya dikulik pada dimensi kedua, yaitu dimensi praktik diskursif. Pada dimensi ini yang ingin dilihat adalah bagaimana faktor-faktor yang berasal dari produsen dan konsumen mempengaruhi wacana yang dibangun dalam teks. dari sisi produsen, BBC Indonesia menganut ideologi jurnalistik *Human Right Journalism* yang sangat *concern* dengan kesejahteraan HAM di kehidupan sehari-hari. Selain itu, inklusifitas juga didukung oleh BBC Indonesia untuk memastikan seluruh sisi dari sebuah peristiwa ter-*cover* dalam pemberitaan oleh media. Hal ini juga berpengaruh pada keberpihakan BBC pada golongan marjinal dalam suatu peristiwa. Seperti pada dua liputan di atas yang mengambil sudut pandang dari para korban sekaligus peserta aksi demonstrasi.

Dari sisi konsumen dapat dilihat respon dari audiens berita sebagai konsumen teks merespon dan memaknai pesan yang ada di dalam teks. Audiens cenderung sepakat dengan wacana yang dibangun oleh BBC Indonesia di dalam beritanya. Walaupun ada sebagian audiens yang merespon tidak setuju dengan wacana yang dibangun oleh BBC, audiens tersebut mendapatkan respon langsung dari audiens lain yang membantah dan meyakinkannya untuk menyetujui wacana BBC Indonesia. Konsumen teks sudah terlanjur tidak percaya dengan aparat kepolisian dan berpihak pada demonstran yang menyuarakan aspirasinya.

Lebih luas dari itu, dimensi praktik sosiokultural melihat konteks sosial yang ada di belakang teks. Pada dimensi ini aspeknya dibagi menjadi dua, yaitu situasional dan institusional. Pada aspek situasional, dikarenakan aksi demonstrasi merupakan sebuah upaya atau usaha dari masyarakat dalam menyapaikan aspirasinya, polisi dilihat sebagai antagonis yang menghalangi tercapainya tujuan upaya tersebut. Ditambah lagi dengan tindakan kekerasan yang dilakukan, menjadikan citra polisi semakin memburuk. Pada aspek institusional, pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh polisi menarik perhatian BBC Indonesia untuk meliput dan membuat berita. HAM yang menjadi daya tarik BBC dalam peliputannya memberikan ruang untuk terbentuknya *Point of View* dari golongan yang termarginalkan dalam suatu peristiwa.

Berangkat dari temuan dalam tiga dimensi tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa citra Kepolisian Negara Republik Indonesia pada demonstrasi penolkan RUU Pilkada 2024 lalu digambarkan oleh BBC Indonesia dengan sentimen negatif. Polri dinilai melakukan pelanggaran HAM dan melakukan tindakan yang berlebihan dalam penanganan demonstrasi. Aparat kepolisian juga melangkahi institusi dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini berangkat dari kepedulian dan keberpihakan BBC terhadap penegakan dan kesejahteraan HAM di masyarakat serta citra Polri yang sebelumnya juga telah terlibat dalam berbagai peristiwa yang negatif di pandangan masyarakat.

BBC sebagai media konsisten menginterpretasikan ideologinya dengan mengkrinstitusi Polri, terutama dalam tindakan pengamanan demonstrasi yang

sering kali dilakukan secara berlebihan dan melanggar prosedur dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini harus dijadikan bahan cerminan bagi aparat untuk menjadi lebih baik. Selain dari pelanggaran secara prosedural, independensi polisi sebagai institusi penegak hukum juga harus menjadi perhatian agar tidak ada bentrok kepentingan antara penegakan hukum dan juga kepentingan pemerintah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, institusi Polri dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota institusinya, terutama dalam tindakan-tindakan yang dilakukan dalam penertiban aksi demonstrasi. Tindakan yang tegas namun terukur harus menjadi pedoman dari seluruh anggota institusi agar masyarakat tidak lagi merasakan ketakutan dan kebencian terhadap Polri yang dianggap akrab dengan kekerasan. Pencitraan positif melalui program ataupun praktik yang dapat meningkatkan kepercayaan publik juga diperlukan untuk memperbaiki citra institusi Polri di hati masyarakat Indonesia.

Selain itu, untuk peneliti yang akan menjadikan penelitian ini sebagai referensi dapat menggunakan peristiwa lain sebagai latar belakang analisis kritis pada media massa yang juga berbeda. Hal ini untuk melihat lebih luas bagaimana Polri dicitrakan pada konteks keadaan yang berbeda. Serta mendapatkan pandangan yang lebih luas dalam melihat Polri diwacanakan oleh media massa. Dengan metode yang sama, tentunya hasilnya dapat saja berbeda apabila ditemukan dengan konteks latar tempat, waktu, dan keadaan yang berbeda.

Peneliti dengan spesifik menyarankan untuk dapat meneliti wacana-wacana yang ditujukan untuk institusi yang berkaitan langsung dengan pemerintah Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk andil akademis dalam membangun bangsa melalui analisis kritis yang mambangun dan memberikan perspektif baru. Konstruksi analisis wacana kritis yang unik memungkinkan peneliti dalam sebuah penelitian untuk berpihak dan menilai sebuah wacana maupun pihak yang diwacanakannya sebagai bentuk kritis. Dengan begitu analisis yang disampaikan tidak sekedar mencari tanda atau menguak ideologi, tetapi juga membangun kritik dari peneliti itu sendiri.